



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM,
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telp. 8584862, Fax. 85910031 (Hunting) ext. 0321

Website <http://www.bpkp.go.id> email : deputi2@bpkp.go.id

Nomor : LGIAT-126/D2/04/2019

Hal : Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan
Teknis atas Pelaksanaan Reviu
Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun
Anggaran 2019 pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

30 Juli 2019

Subbagian Tata Usaha Pimpinan
Bagian Tata Usaha - Biro Umum - Setjen
KEMENDIKBUD

25047

/e-office/TU/ 2019

Tanggal terima : 14 Agustus 2019
Pukul : 13.00

**Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di Jakarta**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis atas Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Surat Kepala BPKP Nomor S-659/K/D2/2019 Tanggal 9 Juli 2019 perihal Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L Triwulan II Tahun Anggaran 2019;
5. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Kementerian/Lembaga Nomor S-562/D2/04/2019 Tanggal 15 Juli 2019 perihal Bimbingan Teknis atas Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 pada Kementerian/Lembaga;

6. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Nomor ST-208/D204/1/2019 tanggal 12 Juli 2019.

B. Tujuan Penugasan

Tujuan Bimbingan Teknis adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman secara teknis kepada auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Mendorong APiP agar informasi hasil Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 yang diinput ke dalam sistem aplikasi berbasis *web* (apip.bpkp.go.id) telah akurat;
3. Memantau proses pengisian data/informasi hasil reviu ke sistem aplikasi sesuai dengan jadwal kegiatan reviu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Bimbingan Teknis oleh Tim dari BPKP terbatas pada pelaksanaan metodologi reviu. Kebenaran data dan informasi yang di-*entry* ke dalam sistem aplikasi menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Metodologi

Kegiatan Bimbingan Teknis atas Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis dalam rangka pengumpulan data, penelaahan dokumen, dan penyusunan Kertas Kerja Reviu;
2. Bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target (metode RCA) dan informasi apabila ada permasalahan lainnya;
3. Pemberian bimbingan dan konsultasi dalam proses *entry* data hasil reviu ke dalam sistem aplikasi;
4. Penyusunan laporan kegiatan Bimbingan Teknis Reviu.

E. Pelaksanaan Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis atas Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 15 Juli s.d. 26 Juli 2019.

F. Hasil Kegiatan

1. Entry data hasil Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan tepat waktu.
2. Tersusunnya laporan hasil reviu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 adalah sebesar Rp14.073.752.313.661,00 atau 129,66% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp10.854.178.668,00 atau 39,10% dari total pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 sebesar Rp35.993.087.934.000,00 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Realisasi Penyerapan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2019 pada
Kemendikbud

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Juta Rupiah)	Rencana Penyerapan (Juta Rupiah)			Realisasi Anggaran (Juta Rupiah)			% Realisasi Terhadap	
			S.d. Triwulan Lalu	Triwulan II	S.d. Triwulan II	S.d. Triwulan Lalu	Triwulan II	S.d. Triwulan II	Rencana Penyerapan Anggaran	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4+5)	(7)	(8)	(9=7+8)	(10=9/6)	(11=9/3)
1	Belanja Pegawai	8.520.196	1.540.815	2.428.406	3.969.221	686.578	2.187.748	2.874.326	72,42	33,74
2	Belanja Barang	16.660.265	1.203.156	2.976.663	4.179.819	1.343.778	3.650.168	4.993.946	119,48	29,98
3	Belanja Modal	1.157.878	94.003	161.726	255.729	4.886	57.503	62.389	24,40	5,39
4	Belanja Bantuan Sosial	9.654.749	789.537	1.659.873	2.449.410	384.111	5.758.980	6.143.091	250,80	63,63
5	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH	35.993.088	3.627.511	7.226.668	10.854.179	2.419.353	11.654.399	14.073.752	129,66	39,10

b. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Target PBJ Tahun 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 708 paket dengan nilai Rp1.363.359.191.416,00 dan telah selesai dilaksanakan dan ditetapkan pemenang lelang hingga Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 134 paket atau 18,93% dengan nilai Rp303.087.422.015,00. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 paket atau 14,69% dari target PBJ Tahun 2019 paket telah tanda tangan kontrak dengan nilai sebesar Rp223.443.477.961,00. Sedangkan terhadap target fisik pekerjaan 100% pada Triwulan II, belum ada pencapaian target. Rincian target dan realisasi PBJ pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan I TA 2019 dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2. Target Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

URAIAN		TRIWULAN I TA 2019		S.D. TRIWULAN II TA 2019		S.D. TRIWULAN III TA 2019		S.D. TRIWULAN IV TA 2019	
		Jml Paket	Miliar Rp	Jml Paket	Miliar Rp	Jml Paket	Miliar Rp	Jml Paket	Miliar Rp
TARGET RUP									
1	Kontrak Ditandatangani	177	340,84	354	681,68	531	1.022,52	708	1.363,36
2	Penyelesaian Pekerjaan (100%)	177	340,84	354	681,68	531	1.022,52	708	1.363,36
REALISASI PBJ									
1	Kontrak Ditandatangani	7	24,68	104	223,44				
2	Penyelesaian Pekerjaan (100%)	0	0	0	0				
% REALISASI PBJ									
1	Kontrak Ditandatangani	3,95	7,24	14,69	16,39				
2	Penyelesaian Pekerjaan (100%)	0	0	0	0				

Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I

No	Tahapan Pengadaan Barang / Jasa	Pengadaan Barang / Jasa		% Terhadap Paket PBJ	
		Paket	Nilai	Paket	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Target PBJ Tahun 2019	708	1.363.359.191.416		
2	Belum dilelang atau masih dalam proses lelang	574	1.060.271.769.401	81,07 %	77,77 %
3	Sudah lelang	134	303.087.422.015	18,93 %	22,23 %
4	Sudah ditetapkan pemenang lelang	134	303.087.422.015		
	a. Belum tanda tangan kontrak	30	79.643.944.054	4,24 %	5,84 %
	b. Sudah tanda tangan kontrak, dengan progres fisik pekerjaan	104	223.443.477.961	14,69 %	16,39 %
	Progres 0%	102	221.089.046.435	98,08 %	98,95 %
	Progres 1-25%	1	-	0,96 %	0,52 %
	Progres 26-50%	1	-	0,96 %	0,54 %
	Progres 51-75%	0	-	0,00 %	0,00 %
	Progres 76-99%	0	-	0,00 %	0,00 %
	Selesai 100%	0	-	0,00 %	0,00 %

Tidak tercapainya target PBJ Triwulan II Tahun Anggaran 2019 disebabkan informasi kemajuan pelaksanaan PBJ tidak mutakhir. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan penggunaan aplikasi SIRENBAJA (Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa) sehingga belum seluruh satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan input proses pelaksanaan PBJ.

c. Kualitas Belanja

Capaian skor kualitas belanja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dengan kategori **Cukup**. Rincian skor masing-masing variabel kualitas belanja ditunjukkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 4. Skor Kualitas Belanja Kemendikbud

No	Variabel	Indikator	Hasil Reviu	Skor
1	Alokasi dan Realisasi	Realisasi belanja barang terhadap rencana penyerapan dana triwulanan	119,48	10
		Realisasi belanja modal terhadap rencana penyerapan dana triwulanan	24,40	3,56
		Realisasi total belanja terhadap rencana penyerapan dana triwulanan	161,27	5
2	Ketepatan Waktu	Realisasi kontrak pengadaan barang/jasa yang sudah ditandatangani	14,69	2,35
		Realisasi penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa	0	0
3	Transparansi dan Akuntabilitas	Informasi keuangan melalui website	100	2
		Melaksanakan e-procurement	100	2
		Sistem pemantauan anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	7
		Sistem pemantauan pengadaan barang/jasa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	7
		Sistem pemantauan kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100	7
4	Efisiensi dan Efektivitas	Penggunaan standar biaya	100	3
		Reviu efisiensi anggaran	100	5
		Jumlah rata-rata revisi anggaran/satuan kerja	0	0
		Persentase realisasi kegiatan/output	90.06	9,01
Total Skor Kualitas Belanja				62,92

Dari reviu atas kualitas belanja menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada variabel seperti uraian di bawah ini:

1) Alokasi dan Realisasi Belanja

Variabel Alokasi dan Realisasi Belanja terdapat permasalahan terkait realisasi belanja modal terhadap RPD triwulanan. Hal ini disebabkan:

- a) Beberapa anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada triwulan II baru dapat dibuka pemblokiran karena ada perubahan mekanisme pengadaan dari tender menjadi non tender; dan
 - b) Penginputan data PBJ oleh Satker belum seluruhnya menggunakan aplikasi SIRENBAJA (Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa).
- 2) Ketepatan Waktu
- Variabel Ketepatan Waktu terdapat kendala disebabkan karena penggunaan SIRENBAJA belum tersosialisasikan dan diimplementasikan kepada/oleh seluruh pengguna, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan waktu untuk melakukan input atas proses pengadaan;
- 3) Efisien dan Efektivitas
- Variabel Efisiensi dan Efektivitas terdapat permasalahan pada rata-rata revisi anggaran yang mencapai lebih dari dua kali. Hal ini karena perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dan kualitas APBN.

G. Permasalahan/ Kendala yang Dihadapi selama Bimtek

Dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak terdapat kendala.

H. Saran

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami sarankan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal agar:

1. Kepada Pengelola Anggaran dari masing-masing program/ kegiatan:
 - a. Mendorong satuan kerja di lingkungan Kemendikbud untuk disiplin dalam melakukan input progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke dalam SINRENBAJA;
 - b. Mendorong penyelesaian progres fisik pada pengadaan barang dan jasa yang telah tanda tangan kontrak sesuai dengan jadwal;

2. Menginstruksikan kepada Biro Umum untuk melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis penggunaan aplikasi SINRENBAJA kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara intensif dan berkala.

Di samping itu, Inspektur Jenderal Kemendikbud agar melakukan pemantauan tindak lanjut atas saran yang telah disampaikan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Emmami Sudarmanto
NIP. 19650704 198503 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.